

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

---

Rapat ke : 3 (tiga)  
Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham)  
Hari, Tanggal : Selasa, 4 Desember 2018  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap:  
1. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*); dan  
2. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)

dengan agenda:

**A. Sesi I, yaitu Pembahasan:**

- 1) Pembukaan
- 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
- 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
- 4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
- 5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

**B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**

- 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan
- 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
- 3) Pendapat Akhir Pemerintah
- 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
- 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
- 6) Penutup

Hadir

- : 1. .... orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu
  - b. Menteri Luar Negeri (Menlu), diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dr. Iur. Damos Dumoli, S.H., M.A.; dan
  - c. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemkumham, Bunyamin, S.H., M.H.  
beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, S.I.P.

## II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap:
  - a. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*); dan
  - a. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang:
  - a. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*); dan
  - b. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap:
  - a. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*); dan

- b. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)

Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui kedua RUU tersebut di atas untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

### III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.28 WIB.

Jakarta, 4 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.**  
**A-340**



**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR    TAHUN  
TENTANG**

**PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
4 DESEMBER 2018**

---

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN	<b>TETAP</b>  RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p>	<p>PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;	<p>tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>);</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>);</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>);</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>);</p>



NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b>
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	<p><b>TETAP</b></p> <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	MEMUTUSKAN:	<p style="text-align: center;">dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
10.	<p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
11.	Pasal 1	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
12.	(1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i> ) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>(1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
13.	(2) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of</i>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>(2) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p><i>(Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)</i> dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
14.	Pasal 2	<p><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 2</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b>
16.	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
17.	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</p>

Jakarta, 4 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.**  
**A-340**



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
4 DESEMBER 2018**

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG	<b>TETAP</b>  RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</i>	NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</i>  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
2.	I. UMUM	<b>TETAP</b>  I. UMUM  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
3.	Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau	<b>TETAP</b>  Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup



NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
4.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	<b>TETAP</b>  Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
5.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence</i>	<b>TETAP</b>  Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
6.	<p>Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
7.	<p>1. Bidang kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>1. Bidang kerja sama, meliputi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	a. pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>a. pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
9.	b. pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer dan bidang lainnya yang disepakati bersama;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>b. pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer dan bidang lainnya yang disepakati bersama;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
10.	c. pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja sama dalam bidang:	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>c. pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja sama dalam bidang:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Tanggal 4 Desember 2018</b>
11.	1) operasi pemeliharaan perdamaian;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>1) operasi pemeliharaan perdamaian;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
12.	2) bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>a. bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
13.	3) operasi pencarian dan penyelamatan;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>b. operasi pencarian dan penyelamatan;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
14.	4) manajemen krisis;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>c. manajemen krisis;</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
15.	5) komando, kendali, komunikasi dan sistem informasi;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>d. komando, kendali, komunikasi dan sistem informasi;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
16.	6) pendidikan, pelatihan dan latihan;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>e. pendidikan, pelatihan dan latihan;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
17.	7) kegiatan lainnya yang disepakati bersama.	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>f. kegiatan lainnya yang disepakati bersama.</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
18.	d. dukungan peran serta personel Angkatan Bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat;	<p align="center"><b>TETAP</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>d. dukungan peran serta personel Angkatan Bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
19.	<p>e. peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>e. peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
20.	<p>f. pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan, meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>f. pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan, meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
21.	<p>2. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>2. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
22.	<p>3. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing Pihak.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing Pihak.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
23.	<p>4. Penyelesaian masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman dilakukan secara damai melalui perundingan antara Para Pihak. Apabila masalah tidak dapat terselesaikan, akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>4. Penyelesaian masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman dilakukan secara damai melalui perundingan antara Para Pihak. Apabila masalah tidak dapat terselesaikan, akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
24.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
25.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
26.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
27.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p>



NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>

Jakarta, 4 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.**  
**A-340**



**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG**

**PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA  
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

***(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA  
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)***

**DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
4 DESEMBER 2018**

---

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA	<b>TETAP</b>  RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p>	<p>TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p>bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia, pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia, pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b>
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	<b>TETAP</b>  Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	MEMUTUSKAN:	<p style="text-align: center;">dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
10.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ( <i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i> ).	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
11.	Pasal 1	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b>
12.	(1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i> ) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>(1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
13.	(2) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i> ) dalam bahasa Indonesia, bahasa Serbia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>(2) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Serbia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-</p>



NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>Undang ini.</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
14.	Pasal 2	<p><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 2</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
16.	Disahkan di Jakarta pada tanggal	<p><b>TETAP</b></p> <p>Disahkan di Jakarta</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p>pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN    NOMOR	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN    NOMOR</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Desember 2018</b></p>

Jakarta, 4 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.**  
A-340



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
4 DESEMBER 2018**

---

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	<b>TETAP</b>  RANCANGAN PENJELASAN ATAS

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
4.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	<b>TETAP</b>  Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
5.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Memorandum of Understanding between the</i>	<b>TETAP</b>  Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
6.	<p>Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
7.	<p>1. Area kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>1. Area kerja sama, meliputi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	a. kebijakan pertahanan dan strategis;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>a. kebijakan pertahanan dan strategis;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
9.	b. dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>b. dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
10.	c. pendidikan dan pelatihan; dan	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>c. pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
11.	d. kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>d. kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.</p>



NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
12.	2. Bentuk kerja sama, meliputi:	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>2. Bentuk kerja sama, meliputi:</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
13.	a. kunjungan pejabat;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>a. kunjungan pejabat;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
14.	b. dialog pertahanan dan strategis;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>b. dialog pertahanan dan strategis;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
15.	c. pertukaran intelijen;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>c. pertukaran intelijen;</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
16.	d. pertukaran pengalaman dan konsultasi;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>d. pertukaran pengalaman dan konsultasi;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
17.	e. program pelatihan dan pendidikan;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>e. program pelatihan dan pendidikan;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
18.	f. partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar;	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>f. partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar;</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
19.	g. pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan; dan	<p align="center"><b>TETAP</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>g. pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan; dan</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
20.	h. bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.	<p><b>TETAP</b></p> <p>h. bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
21.	3. Pembentukan Komite Bersama guna mengoordinasikan, memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman.	<p><b>TETAP</b></p> <p>3. Pembentukan Komite Bersama guna mengoordinasikan, memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman.</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
22.	4. Pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia, sedangkan informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terpisah.	<p><b>TETAP</b></p> <p>4. Pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia, sedangkan informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terpisah.</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
23.	5. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pertemuan dan penyambutan Komite Bersama dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>5. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pertemuan dan penyambutan Komite Bersama dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
24.	6. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>6. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
25.	7. Para Pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur negara masing-masing, serta dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>7. Para Pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur negara masing-masing, serta dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
26.	<p>8. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan, jika perlu penyelesaiannya dilakukan melalui saluran resmi.</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>8. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan, jika perlu penyelesaiannya dilakukan melalui saluran resmi.</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
27.	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b></p>
28.	<p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Tanggal 4 Desember 2018</b>
29.	Pasal 2 Cukup jelas.	<b>TETAP</b>  Pasal 2 Cukup jelas.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>
30.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<b>TETAP</b>  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Desember 2018</b>

Jakarta, 4 Desember 2018

**KETUA RAPAT,**

**ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.**

**A-340**